

**PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SUKARIMBUN
KECAMATA KETAMBE KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Dalam Dakwah dan Komunikasi**

Oleh:

RIAN KANDRA

NIM. 13153008

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

**PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
EKONOMI MASYARAKAT DI DESA SUKARIMBUN
KECAMATAN KETAMBE KABUPATEN
ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Sidang Munaqasyah Penelitian
Dalam Penyusunan Skripsi**

Oleh:

RIAN KANDRA

NIM. 13153008

Program Studi: Pengembangan Masyarakat Islam

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. H. Sahrul, M.Ag

NIP.19660501 199303 1 005

Drs. H. Muniruddin, MA

NIP.196412012 014111 1 001

**FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

Nomor : Istimewa

Medan, November 2019

Lampiran : -

Kepada Yth:

Hal : Skripsi

Bapak Dekan Fakultas Dakwah

An. Rian Kandra

dan Komunikasi UIN SU

Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran dan masukan seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan skripsi mahasiswa An. Rian Kandra yang berjudul: **Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara**, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Sahrul, M.Ag
NIP. 19660501 199303 1 005

Drs. H. Muniruddin, MA
NIP. 196412012 014111 1 001

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe, apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe, apa hambatan yang di hadapi pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pemberdayaan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informasi penelitian oleh Bapak Asbi Nasri, Bapak Manan, Bapak Ayu, Bapak Salam, penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara (*interview*), observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis.

Temuan penelitian sebagai berikut: (1) Pemberdayaan Pemerintah Desa yang dilakukan oleh pemerintah sangat membantu masyarakat supaya terberdaya dengan adanya pemberdayaan dari pemerintahan sebagian masyarakat sudah terberdayakan, (2) hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat adalah dana yang dimiliki masih tergolong rendah, belum bisa memberdayakan masyarakat lebih banyak lagi, dan lahan perkebunan yang langsung berbatasan dengan hutan lindung membuat masyarakat tidak bisa menambah lahan perkebunan, (3) tanggapan masyarakat terhadap pemberdayaan pemerintah desa, masyarakat merasa bersyukur atas pemberdayaan pemerintah desa.

Kata Kunci: Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara

ABSTRACT

This study aims to reveal how the empowerment of the Village Government in Improving the Community's Economy in Sukarimbun Village, Ketambe District, what are the efforts made by the village government in improving the community economy in Sukarimbun Village, Ketambe District, what are the obstacles faced by the village government in improving the community economy in Sukarimbun Village Ketambe Subdistrict, and how the community responded to the empowerment of the village government in improving the community economy in the Sukarimbun Village, Ketambe Subdistrict. This research was conducted in Sukarimbun Village, Ketambe District, Southeast Aceh Regency.

The method used in this research is qualitative research with a descriptive approach. Research information by Mr. Asbi Nasri, Mr. Manan, Mr. Ayu, Mr. Salam, this research is to use interview techniques, observation, and documentation conducted by the author.

The research findings are as follows: (1) Empowerment of the Village Government by the government is very helpful for the community to be empowered with the empowerment of the government, some people have been empowered, (2) the obstacles faced by the village government in empowering the community are that the funds owned are still relatively low, not yet can empower more communities, and plantation land directly adjacent to protected forests makes the community unable to add to plantation land, (3) the community's response to the empowerment of the village government, the community feels grateful for the empowerment of the village government.

Keywords: Empowerment of Village Government in Improving Community Economy in Sukarimbun Village, Ketambe District, Southeast Aceh Regency

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Teruntuk ayah dan ibu saya ucapan terimakasih sebesar-besarnya karena mendidik dan membesarkan saya sampai seperti ini

Skripsi ini berjudul “**Pemberdayaan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara**”. Disusun guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial dalam dakwah dan komunikasi UIN Sumatera Utara. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan, hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mempunyai banyak harapan semoga skripsi ini dapat menjadi alat penunjang dan ilmu pengetahuan bagi penulis pada umumnya.

Dalam usaha penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bantuan materi maupun moril. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat atas penulisan skripsi ini dengan segala partisipasi dan motivasinya. Secara khusus penulis ucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta. Ayahanda tercinta **Kalamudin** dan Ibunda **Siti Mariam** yang telah melahirkan, mengasuh, dan membesarkan, serta mendidik penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Dengan cinta, kasih sayang

dan pengorbanannya adalah penulis semangat dalam menyelesaikan program Sarjana S-1 UIN SU Medan.

2. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN SU Medan
3. Bapak Dr. Soiman, MA. selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN SU Medan.
4. Bapak Dr.H. Muaz Tanjung, MA selaku Ketua Jurusan Pengembangan masyarakat islam (PMI) UIN SU Medan.
5. Bapak Dr. H. Sahrul, M.Ag sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Drs. H. Muniruddin, MA sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SU Medan
8. Kepada seluruh pihak Pemerintah Desa, teruntuk kepala desa dan aparatur desa yang sudi kiranya membantu dalam penyelesaian skripsi
9. Ketiga saudara penulis Fitri Ana Sari, Arman Kandra, Nirwana Sari, yang senantiasa memberikan cinta, kasih sayang, nasehat, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan program sarjana S-I UIN SU Medan. Semoga Allah Swt memberikan, kesehatan, keselamatan, dan balasan kebaikan yang tak terhingga. Aamiin.
10. Teman seperjuangan dan keluarga PMI-B stambuk 2015: Andiriani Hrp, Amelia Pjt, Ainul Mardiah, Ade Aulia Husna, Ainun Hamidah Hsb, Erfina Hrp, Dewi Suhartini, Gisra Chairumi, Mhd Fadlan, Hijrina Sari Mrp, Ika Nur'ani, Jam'ah Hrp, Kharatun Nazmi Gayo, Khairatunnisa Nst, Khairani Smjk, Laila Sukriani Hsb, Lasmawati, Maulida Fitri, Mhd Rasyid Ibrahim Nst, Pramudianto Ifandi, Syaid Basrah Lubis,

Suprijal R, Wahyu Rizky Parmanda. senantiasa memberikan masukan, semangat dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini dan senantiasa mendorong penulis untuk selalu maju.

11. Kepada sahabat saya Sari Dayanti Napitupulu, Mhd Al-Idil Al-Amin S.Pd, Murdi Al-isyira SE, Tahmi Pazri S,Pd, Ray Sani Jawaris SH yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berupaya dengan segala upaya yang dilakukan dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Kiranya isi skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, Amin....

Medan, Februari 2020

Rian Kandra
Nim : 13153008

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Istilah.....	4
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematis Pembahasan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pemberdayaan Masyarakat	9
1. Pengertian Pemberdayaan	9
2. Tujuan Pemberdayaan.....	14
3. Proses Pemberdayaan.....	16
4. Tahapan Pemberdayaan	18
B. Pemerintah Desa	22
1. Pengertian Pemerintah Desa	22
2. Perinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa	24
C. Ekonomi Masyarakat	29
D. Hubungan ekonomi dengan masyarakat	35
E. Penelitian Yang Relevan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisa Data	41
F. Keabsahan Data	42
G.	

BAB IV HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum.....	43
B. Upaya Pemberdayaan Pemerintah Desa	48
C. Kendala yang dihadapi pemerintah desa.....	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	44
1.2	45
1.3	46
1.4.....	53
1.5.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara maritim yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang amat sangat melimpah, kekayaan alam Indonesia seharusnya sudah bisa mengatasi kemiskinan, akan tetapi, kurangnya keahlian dan pemberdayaan terhadap masyarakat membuat pengelolaan sumber daya alam tidak berfungsi dengan semestinya sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat tidak stabil.

Indonesia salah satu Negara berkembang dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, upaya yang di lakukan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian melalui pemerintah desa sebagai pemerintahan yang terendah, maka kedudukan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sangat penting untuk menunjang kehidupan.

Pemerintah desa merupakan unit terbawah yang memiliki instansi secara langsung melayani masyarakat yang di tuntutan untuk memberikan pelayanan public yang di butuhkan oleh masyarakat, profesional di dalam memberikan berbagai pelayanan yang di butuhkan oleh masyarakat. Kepala desa sebagai aparat pemerintah selaku abdi Negara dan masyarakat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut kepentingan umum.

Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa. Inti dari pemberdayaan masyarakat adalah bagaimana rakyat dibantu agar lebih berdaya sehingga tidak hanya dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuannya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya, tetapi juga sekaligus meningkatkan kemampuan ekonomi nasional.

Peningkatan perekonomian seharusnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama dalam membentuk dan merubah

perilaku masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas.

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai proses penyerahan kekuasaan dari pemerintah kepada pihak yang tak berdaya (masyarakat miskin), supaya dapat memiliki kekuatan untuk meningkatkan ekonomi yang mumpuni, masyarakat miskin memiliki ciri ketidakberdayaan secara ekonomi, dan berada dibatas atau dibawah ambang kemampuan materil untuk mencukupi kebutuhan minimal yang diperlukan sebagai manusia.

Kehidupan ekonomi masyarakat desa tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang mereka dapatkan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin luas pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya jika seseorang memiliki pendidikan yang lebih rendah maka keinginan dan wawasan cenderung kurang. Oleh karena itu, peningkatan perekonomian harus dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada. Meskipun tidak mengenyam pendidikan yang tinggi setidaknya seseorang mampu dan dibekali dengan berbagai keterampilan yang bermanfaat untuk kehidupannya.

Terkait dengan latar belakang diatas maka sangatlah diperlukan peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Bentuk kepedulian pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yaitu pemerintah desa memberdayakan masyarakatnya dengan memberikan pelatihan penanaman, pengurusan, dan pendanaan pertama di tanggung pemerintah desa sampai ada hasil yang diperoleh, pemberdayaan melalui bidang pertanian berupa serai wangi.

Sebelum masyarakat diberdayakan oleh pemerintah desa masyarakat hanya mengharapkan hasil bumi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dikarekan berbagai aspek seperti tanaman gagal panen, harga turun, dan gangguan hama lainnya. Setelah pemerintah desa memberdayakan masyarakat yang membutuhkan, melalui tanaman Serai Wangi masyarakat dapat terberdayakan oleh pemerintah, dari penelitian yang

dilakukan oleh penulis, penulis sudah mendapati petani yang diberdayakan pemerintah secara ekonomi telah sejahtera.

Pak Manan sudah menyelesaikan bangunan yang lama tertunda dan kereta gunung, Pak Ayu bisa sekolahnya ke2 anaknya di ponpes yang cukup terkenal dan memiliki biaya sekolah yang tinggi, Pak Salam bisa membeli rumah yang sebelumnya hanya mengontrak/menyewa rumah warga desa, langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa sangat tepat dalam memberdayakan masyarakatnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis benar bahwa masyarakat yang diberdayakan pemerintah desa sejahtera dari segi bidang ekonomi meski masih ada hambatan yang di hadapai oleh pemerintah desa yaitu dana yang masih cukup kecil untuk memberdayakan masyarakat yang banyak, dikarenakan wilayah perkebunan masyarakat langsung berbatasan dengan hutan nasional gunung leuser maka masyarakat tidak diperbolehkan untuk perluasan lahan perkebunan.

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan urain di atas maka permasalahan yang menjadi fokus perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa upaya yang di lakukan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarkat di Desa Sukarimbun Kec Ketambe Kab Aceh Tenggara?
2. Apa saja kendala yang di hadapi pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukarimbun Kec Ketembe Kab Aceh Tenggara?

C. Batasan Istilah

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami

kemiskinan.¹ Adapun pemberdayaan yang dilakukan pemerintah desa dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, pengontrolan, dan pengevaluasian.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia.²

3. Ekonomi Masyarakat

Kata ekonomi itu sendiri bersal dari “*oikos*” yang artinya rumah tangga, dan “*nomos*” yang berarti hukum, kaidah atau pengelolaan. Dengan demikian, secara sederhana ekonomi dapat diartikan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan pengelolaan suatu rumah tangga.³ Ekonomi yang dimaksud disini yaitu ekonomi masyarakat.

Ekonomi masyarakat adalah pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dalam melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di berbagai bidang. Bidang yang di kembangkan oleh pemerintah desa adalah penanaman Serai Wangi.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukarimbun Kec Ketambe Kab Aceh Tenggara
2. Untuk mengetahui kendala pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukarimbun Kec Ketambe Kab Aceh Tenggara

E. Manfaat Penelitian

¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006) hlm. 59.

² PP No. 72 Tahun 2005 pasal 1 (7)

³ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekono*i, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) hlm. 2.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan kajian dan referensi yang berkaitan dengan pemberdayaan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperaktekkan ilmu pendidikan luar sekolah Sebagai acuan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengkaji fenomena pemberdayaan masyarakat.

3. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar sarjana pada program Pengembangan Masyarakat Islam FDK UIN-SU.
- b. Sebagai bekal pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan selama perkuliahan kedalam karya nyata.
- c. Dapat mengetahui pemberdayaan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat

F. Sistematis Pembahasan

Pada bagian ini dicantumkan rencana laporan penelitian sebagai gambaran dari permasalahan yang akan diteliti. Dirumuskan dalam bentuk bab-bab dan masing-masing bab dirinci kedalam beberapa subbab yang berkaitan.

BAB I merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematis pembahasan.

BAB II dipaparkan tentang landasan teori yang digunakan dalam bab ini akan diuraikan secara teoritis mengenai pengertian pemberdayaan, pemerintah desa, ekonomi masyarakat, hubungan ekonomi dan masyarakat, dan penelitian yang relevan.

BAB III membahas tentang metodologi penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, instrument pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan keabsahan data.

BAB IV membahas tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum desa, upaya pemberdayaan pemerintah desa, kendala yang di hadapi pemerintah desa.

BAB V membahas tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).⁴

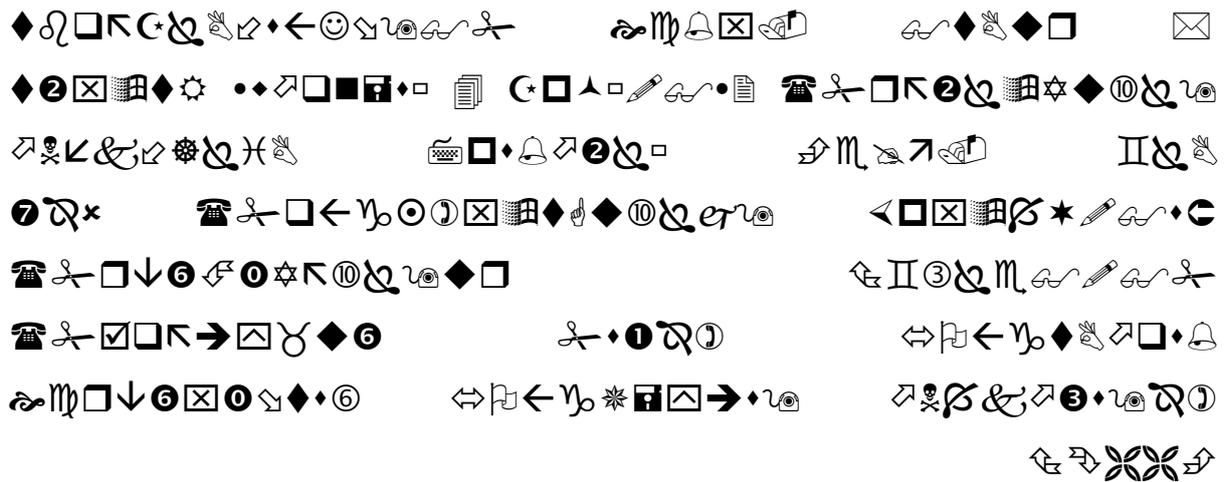
Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.⁵

Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat

Surah At-Taubah ayat 122

⁴ *Ibid*, 59.

⁵ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. (Jogjakarta: Gava Media,2004) hlm. 7.



Artinya: tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.

Dalam kitab tafsirnya yang berjudul *jami' Al-Bayan fii Ta'wil Al-Qur'an* atau yang lebih sering dikenal dengan nama *Tafsir At-Thabari*, Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari menjelaskan begitu banyak perbedaan pendapat para ulama ahli Tafsir dalam memahami ayat tersebut. Diantara mereka, ada yang menitikberatkan dalam kajian historis, pendekatan kritik sosial, dan aktualisasi isi kandungan ayat. Beberapa diantaranya terangkum dalam beberapa pendapat berikut:

Diriwayatkan dari sahabat Mujahid Ra, beliau berkata: “Dulu, para sahabat nabi banyak yang ditugaskan di daerah suku pedalaman tanah arab. Di sana, mereka membangun interaksi yang baik dan memajukan sektor pertanian yang bermanfaat bagi penduduk setempat. Selain itu, para sahabat nabi tersebut juga mendakwahkan ajaran islam kepada penduduk setempat. Akhirnya mereka kembali dan menemui Rasulullah Saw untuk menceritakan apa yang telah mereka alami. Sehingga turunlah ayat ini.

Sahabat Qatadah ra, mengambil pemahaman bahwa ketika Rasulullah Saw mengutus angkatan perang, hendaklah sebagian diantara mereka tetap tinggal bersama beliau untuk

lebih memperdalam pengetahuan agama mereka. Kemudian sebagian upaya tindak lanjut, mereka juga berkewajiban mendakwahkan apa yang telah didapat terhadap kamunya.

Secara garis besar, dari QS. At-Taubah/ayat/122 dapat di tarik sebuah pemahaman. Kandungan dan penafsiran ayatnya bermuara pada kewajiban seorang muslim untuk bertanggung jawab atas keadaan umat yang ada disekitarnya. Karena dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat sekitar merupakan sebuah amanah yang murni muncul dari kesadaran sosial semata.⁶

Defenisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan

1. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
2. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kehidupannya.
3. Pemberdayaan merujuk pada pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
4. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa) atas kehidupannya.⁷

Menurut Widjaja Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan

⁶ Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, *Jami' Al-Bayan fii Ta'wil Al-Quran*, (Jakarta: Pustaka Azza, 2008) hlm. 48.

⁷ Agus Ahmad Safei, Nanih Machendrawati, *pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, (Bandung:Remaja Rosda Karya, 2003) hlm. 59.

perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas dan efisiensi.⁸

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.⁹

Pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal. Konsep pemberdayaan dapat dipandang sebagai bagian atau sejiwa sedarah dengan aliran yang muncul pada paruh abad ke-20 yang lebih dikenal sebagai aliran postmodernisme. Aliran ini menitikberatkan pada sikap dan pendapat yang berorientasi pada jargon antisistem, antistruktur, dan antideterminisme yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan. Pemahaman konsep pemberdayaan oleh masing-masing individu secara selektif dan kritis dirasa penting, karena konsep ini mempunyai akar historis dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat.¹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternative pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

⁸ Haw Widjaja, *Pemerintahan Desa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 169.

⁹ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999) hlm. 32.

¹⁰ Usman Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004) hlm. 36.

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan dan keterbelakangan, kesenjangan, ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, terbatasnya akses pada tanah padahal ketergantungan pada sektor pertanian masih sangat kuat, melemahnya pasar-pasar lokal/tradisional karena dipergunakan untuk memasok kebutuhan perdagangan internasional. Dengan perkataan lain masalah keterbelakangan menyangkut struktural (kebijakan)¹¹ dan kultural Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri.

Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Pelaku pemberdayaan harus dapat berperan sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang baik. Pelaku pemberdayaan tidak hanya dituntut untuk memperdaya pengetahuannya, melainkan mereka dituntut meningkatkan ketrampilannya dalam mendesain pemberdayaan. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka

¹¹ *Ibid*

lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan sertamelakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.¹²

3. Proses pemberdayaan

Proses pemberdayaan memerlukan tindakan aktif subyek untuk mengakui daya yang memiliki obyek dengan memberinya kesempatan untuk mengembangkan diri sebelum akhirnya obyek yang beralih fungsi menjadi subyek yang baru. Karena proses tersebut didukung oleh faktor atau stimulus dari luar, maka subyek tersebut sebagai faktor eksternal. Selain itu, faktor internal yang mementingkan tindakan aktif obyek atau masyarakat miskin sendiri juga merupakan prasyarat penting yang dapat mendukung proses pemberdayaan yang efektif.¹³

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisis, kemudian mencari solusinya.

¹² Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan*, hlm. 7.

¹³ Pranaka, Prijono Onny, *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: CSIS, 1996) hlm. 137.

Kartasmita mengatakan bahwa proses pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga proses yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Titik tolaknya adalah bahwa setiap manusia memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya tidak ada sumber daya manusia atau masyarakat tanpa daya. Dalam konteks ini, pemberdayaan adalah membangun daya, kekuatan atau kemampuan, dengan mendorong (encourage) dan membangkitkan kesadaran (awareness) akan potensi yang dimiliki serta berupaya mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering), sehingga diperlukan langkah yang lebih positif, selain dari iklim atau suasana.
- c. Memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaannya dalam menghadapi yang kuat.¹⁴

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan:

1. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau menjadikan sebagian kekuatan, supaya berdaya.
2. Menekankan pada proses stimulus, mendorong atau memotivasi agar individu mempunyai kemampuan akan keberdayaan.¹⁵

Hakikat pemberdayaan masyarakat adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Dalam proses tersebut masyarakat bersama-sama melakukan hal-hal berikut:

¹⁴ Ginanjar Kartasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, (Jakarta: Bappenas.1996) hlm. 23.

¹⁵ Jafar Hafisah, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Iris Pres, 2006) hlm. 136.

1. Mengidentifikasi dan mengkaji potensi wilayah kegiatan ini dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Pada tahap ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan, proses ini meliputi:
 - a. Persiapan masyarakat dan pemerintah setempat untuk melakukan pertemuan awal dan teknis pelaksanaannya.
 - b. Persiapan penyelenggaraan pertemuan.
 - c. Pelaksanaan kajian dan penilaian keadaan.
 - d. Pembahasan hasil dan penyusunan rencana tindak lanjut.
2. Menyusun rencana kegiatan kelompok, berdasarkan hasil kajian, meliputi:
 - a. Memprioritaskan dan menganalisa masalah-masalah.
 - b. Identifikasi alternatif pemecahan masalah yang terbaik.
 - c. Identifikasi sumberdaya yang tersedia untuk pemecahan masalah.
 - d. Pengembangan rencana kegiatan serta pengorganisaian pelaksanaannya.
3. Menerapkan rencana kegiatan kelompok: rencana yang telah disusun bersama dengan dukuan fasilitas dari pendamping selanjutnya diimplementasikan dalam kegiatan yang kongkrit dengan tetap memperhatikan realisasi dan rencana awal
4. Memantau proses dan hasil kegiatan secara terus menerus secara partisipatif (*participatory monitoring and evaluation/PME*). PME ini dilakukan secara mendalam pada semua tahapan pemberdayaan masyarakat agar proses penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan, baik prosesnya (pelaksanaan) maupun hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan kalau diperlukan.¹⁶

¹⁶ Totok Mardikanto, PoerwokoSoebiato, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 125-126.

Pada kenyataannya proses pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat tetapi harkat martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan.

4. Tahapan pemberdayaan

Menurut Sumodingningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, meski dari jauh dijaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status, mandiri.¹⁷ Tahapan intervensi sosial dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu siklus perubahan yang berusaha mencapai ke taraf yang lebih baik.¹⁸

Proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui tokoh-tokoh masyarakat (*key person*), tetapi juga menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Tahap persiapan

Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyiapan petugas. Yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya di usahakan dilakukan secara non-direktif.

b. Tahap pengkajian (*Assesment*)

¹⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan*, hlm. 41.

¹⁸ Adi Isbandi Rukmianto, *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hlm. 179.

Pada tahap ini yaitu dapat melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan dan sumber daya yang dimiliki klien.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dilakukan.

d. Tahap pemformulasi rencana aksi

Pada tahap ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Disamping itu juga petugas membantu untuk memformulasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

e. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat berperan sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahap ini karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan.

f. Tahapan evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan

melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek bisa terbentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunitas masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

g. Tahap terminalasi

Tahap terminalasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Petugas harus tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin. Kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.¹⁹

Menurut Sulistiyani menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan pemberian keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.²⁰

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dengan menekankan pada proses, maka pemberdayaan masyarakat memiliki tahap-tahap sebagai berikut:

¹⁹ Isbandi Rukminto Adi, *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: LP FEUL, 2002), hlm. 54.

²⁰ Ambar Teguh Sulistiyan, *Kemitraan*, hlm. 83-84.

- a. Penyadaran pada tahap ini, dilakukan sosialisasi terhadap komunitas agar mereka mengerti bahwa kegiatan pemberdayaan ini penting bagi peningkatan kualitas hidup mereka, dan dilakukan secara mandiri
- b. Pengkapasitasan sebelum diberdayakan, komunitas perlu diberikan kecakapan dalam mengelolanya. Tahap ini sering disebut sebagai capacity bulding, yang terdiri atas pengkapasitasan, organisasi, dan system nilai.
- c. Pendayaan pada tahap ini, target diberikan daya, kekuasaan, dan peluang sesuai dengan kecakapan yang sudah diperolehnya.²¹

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan tahapan pemberdayaan masyarakat melalui penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberdayaan, sehingga masyarakat mampu mandiri dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, mensejahterkan adalah kewajiban bersama dalam lungkup keluarga dan negara.

Upaya pemberdayaan masyarkat perlu didasari pemahaman bahwa munculnya ketidakberdayaan masyarakat akibat masyarakat tidak memiliki kekuatan (*powerless*) beberapa jenis kekuatan yang dimiliki masyarakat dapat digunakan untuk memberdayakan mereka.

1. Kekuatan atas pilihan pribadi. Upaya pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan pilihan pribadi atau kesempatan untuk hidup lebih baik.
2. Kekuatan dalam menentukan kebutuhannya sendiri. Pemberdayaan dilakukan dengan mendampingi mereka untuk merumuskan kebutuhannya sendiri.
3. Kekuatan dalam kebebasan berekspresi. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan kapasitas untuk bebas berekspresi dalam bentuk budaya public.

²¹ Wrihatnolo dan Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT. Elek Media Komputindo, 2007) hlm. 3.

4. Kekuatan kelembagaan. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap kelembagaan pendidikan, kesehatan, keluarga, keagamaan, sistem kesejahteraan sosial, struktur pemerintahan, media dan sebagainya.
5. Kekuatan sumber daya ekonomi. Pemberdayaan dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas dan control terhadap aktivitas ekonomi.
6. Kekuatan dalam kebebasan reproduksi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat dalam menentukan proses reproduksi

Faktor yang menyebabkan ketidakberdayaan masyarakat adalah ketimpangan, ketimpangan yang sering terjadi pada masyarakat meliputi:

1. Ketimpangan struktural yang terjadi diantara kelompok primer, seperti perbedaan kelas orang kaya dengan orang miskin, buruh dan majikan, ketidaksetaraan gender, ras etni, dan antara minoritas dan mayoritas.
2. Ketimpangan kelompok akibat perbedaan usia, kalangan tua dengan muda, keterbatasan fisik, mental dan intelektual.
3. Ketimpangan personal akibat faktor kematian, kehilangan orang-orang yang dicintai, persoalan pribadi, dan keluarga

Melaksanakan dan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat akan berjalan efektif jika sebelumnya sudah dilakukan investigasi terhadap faktor-faktor yang menjadi akar permasalahan sosial. Dalam konteks ini, perlu diklarifikasi apakah akar penyebab ketidakberdayaan berkaitan dengan faktor kelangkaan sumberdaya atau faktor ketimpangan, ataukah kombinasi antar keduanya.

Upaya memberdayakan kelompok masyarakat yang lemah dapat dilakukan dengan tiga strategi

1. Pemberdayaan melalui perencanaan dan kebijakan yang dilaksanakan dengan membangun atau mengubah atau mengubah struktur dan lembaga yang bisa

memberikan akses yang sama terhadap sumberdaya, pelayanan dan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

2. Pemberdayaan melalui aksi-aksi sosial dan politik yang dilakukan perjuangan politik dan gerakan dalam rangka membangun kekuasaan yang efektif.
3. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penumbuhan kesadaran yang dilakukan dengan proses pendidikan dalam berbagai aspek yang cukup luas. Upaya ini dilakukan dalam rangka membekali pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat lapis bawah dan meningkatkan kekuatan mereka.²²

B. Pemerintah Desa

1. Pengertian Pemerintah Desa

Dalam UU No 6 Tahun 2014 pasal 1 yang menyatakan bahwa pemerintah desa adalah yang penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan meng urus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota,

²² Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana Dan Praktik*, (Jakarta: Prenadamedia Group), hlm, 27.

dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Jumlah Penduduk.
- b. Luas Wilayah.
- c. Bagian Wilayah Kerja.
- d. Perangkat, dan.
- e. Sarana dan Prasarana Pemerintahan.²³

2. Prinsip Dasar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah desa adalah:

- a. Untuk menjamin terselenggaranya tertib pemerintahan dan sesuai pula dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa sejauh mungkin diseragamkan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas Desa di Seluruh Indonesia yang beraneka ragam baik dalam susunan masyarakat, tata hukum adatnya maupun latar belakang kehidupannya sebagai satuan masyarakat terkecil. Keseragaman tersebut meliputi kebijaksanaan-kebijaksanaan pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang diarahkan kepada perwujudan daya guna dan hasil guna yang rasional.
- b. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa hanya mengatur Desa dan Kelurahan dari segi pemerintahannya. Dengan demikian Undang-undang tersebut tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum adat

²³ Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa.

dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pemerintahan. Pembangunan dan ketahanan nasional dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa tidak mengarah kepada pembentukan Daerah Otonomi tingkat tiga. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-undang tersebut yang menegaskan bahwa walaupun Desa mempunyai hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, tetapi hak tersebut bukanlah hak otonomisebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Telah ditetapkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa dan berbagai peraturan sebagai kebijaksanaan pelaksanaannya, diharapkan akan dapat makin mantap penyelenggaraan pemerintahan Desa secara terpadu dan menyeluruh sehingga terwujud hubungan yang jelas antara sistem penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004.

Program tahunan dalam rencana kerja yang disusun oleh pemerintah Desa terhadap kegiatan-kegiatan yang kebijaksanaan dan sistem penyelenggaraan pemerintah Desa yang selama ini diatur dengan berbagai kebijaksanaan Daerah menjadi sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa secara Nasional dengan pola yang seragam ini berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 adalah merupakan pembaharuan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Desa. Oleh karena itu dalam melakukan pengkajian terhadap materi Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan berbagai peraturan pelaksanaannya diperlukan adanya ketelitian dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan suatu penafsiran yang keliru.²⁴

²⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

C. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *economy* sementara kata *ekonomi* itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomike* yang berarti pengelolaan rumah tangga. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi sebagai pengelolaan rumah tangga adalah surat usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya dengan berhubungan dengan pengalokasian sumber daya rumah tangga yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha keinginan masing-masing. Oleh karena itu, suatu rumah tangga selalu dihadapkan pada banyak keputusan dan pelaksanaannya. Tidak berbeda halnya dengan rumah tangga, masyarakat juga selalu dihadapkan pada banyak keputusan dan pelaksanaannya.

Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya masyarakat (rumah tangga dan pebisnis/perusahaan) yang terbatas diantara berbagai anggotanya, dengan mempertimbangkan kemampuan, usaha, dan keinginan masing-masing.²⁵ Dalam perekonomian yang berdasarkan pada ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi, peran masyarakat sangat besar. Untuk itu diperlukan suatu usaha pemberdayaan masyarakat, terutama menghadapi proses industrial yang memasuki era perdagangan dan investasi bebas, yang tentu saja akan lebih memperhitungkan aspek keunggulan mutu hasil produksian keuntungan hasil penjualan.

Didalam QS Al-Jumua: 10 menjelaskan tentang ekonomi sebagai berikut:



²⁵ Damsar, *Sosiologi Ekonomi* (Jakarta:Prenada Media Group,2011),hlm 9-10.



Artinya: *apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Ayat diatas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan allah mencari karunia allah dibumi rejeki tersebut tentu tidakkan datang kepada kita andai kita tidak berihktiar. Allah sudah menetpakan sunnatullah untuk manusia mendapatkan rizki, tinggal manusia mengoptimalkan dan mengaturnya dengan baik atau tidak.

Hal ini misalnya, allah menciptakan pohon manga beserta sistem tumbuh dan berkembangnya. Manusia bisa mendapatkan rizki manga-mangga tersebut asalkan ia mau mengolahnya, merawat, dan memetikny secara rutin sampai dijual kepada konsumen. Jika tidak dilakukan, tentu saja rezeki tersebut tidakkan bisa didapatkan.

Dalam suatu sistem ekonomi tercakup nilai-nilai, kebiasaan, adat-istiadat, hokum, norma-norma, aturan-aturan berikut kesepakatan akan tujuan bersama serta otoritas dan kekuasaan untuk mengarahkan sumber daya yang ada untuk tuuan bersama.²⁶ Peningkatan ekonomi dipandang sebagai kenaikan dalam pendapatan-pendapatan perkapita dan lajunya pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan PDB untuk tingkat nasional dan PDRB untuk tingkat wilayah. Defenisi pembangunan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian pembangunan ekonomi, karena pada dasarnya baik tujuan pembangunan maupaun pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi kerakyatan yang di dasarkan pada Pancasila dan UUD-45 sudah lama menjadi cita-cita para pendiri Negara ini *kerakyatan* dipetik dari sila *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*. Apabila kedua kata tersebut disandingkan dengan pembangunan nasional, maka pengertiannya menurut GBHN

²⁶ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, hlm. 3-4.

adalah menjadi: “*pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan bangsa*”, sedangkan ekonomi kerakyatan menurut visi dari UUD 1945 pasal 27 adalah: “*tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”,

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa misi ekonomi kerakyatan yang pokoknya adalah penyediaan lapangan kerja, serta mewujudkan taraf hidup yang layak bagi seluruh warga Negara dengan demikian prekonomian rakyat mempunyai misi yang luhur, aspek prekonomian bangsa yang selalu berpihak pada kepentingan rakyat banyak.²⁷

Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, melainkan juga tugas pemerintah desa. Peran pemerintah desa dibutuhkan untuk memantau keadaan disetiap daerah dan memfasilitasi adar terjadi pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di berbagai bidang.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat

1. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan bersekala kecil dalam mengembangkan kegiatan usaha ekonomi yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Kurangnya akses masyarakat kepada input sumber daya ekonomi berupa modal usaha, informasi pasar dan teknologi
3. Lemahnya kemampuan masyarakat golongan ekonomi lemah untuk membangun organisai ekonomi masyarakat (perusahaan) yang memiliki posisi tawar (*berning power*) dan daya saing menghadapi perusahaan besar.

²⁷ Priyono Tjiptoherijanto, *Prospek Prekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 138

Dengan melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mendorong berkembangnya usaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan memberikan bantuan modal dengan bunga rendah, memberikan kesempatan dan kemudahan mengembangkan usaha dan berusaha, serta membekali pengetahuan atau keterampilan yang dibutuhkan, maka diharapkan akan dapat mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi produktif dalam masyarakat.²⁸

Untuk mewujudkan peningkatan perekonomian berdasarkan karakteristik potensi, geografis dan kebutuhan daerah, maka strategi kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi dan produksi serta meningkatkan keterkaitan ekonomi antar daerah yang saling mendukung.
2. Mendorong pemanfaatan potensi sumber daya alam yang belum tergali di daerah tertinggal dan menciptakan perkembangan kawasan-kawasan potensi ekonomi baru.
3. Meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah ada di sentra-sentraproduksi di daerah yang relatif maju sebagai andalan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkannya dalam kerangka perekonomian wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik potensi geografis dan kebutuhan daerah
4. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia, dan lokasi geografis.²⁹

²⁸ Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm. 133-134.

²⁹ *Ibid*, 126.

D. Hubungan Ekonomi Dengan Masyarakat

Pusat perhatian dari kajian para ekonomi adalah pertukaran ekonomi adalah pertukaran ekonomi, pasar, dan ekonomi. Sedangkan masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang diluar, dia dipandang sebagai sesuatu yang telah ada (given) sebaliknya, sosiologi memandang ekonomi sebagai bagian integral dari masyarakat.

Sosiologi tidak terbiasa melihat kenyataan dengan melakukan *ceteris paribus* terhadap faktor-faktor yang dipandang berpengaruh terhadap suatu kenyataan sosial tetapi sebaliknya, sosiologi terbiasa melihat kenyataan secara holistic, melihat kenyataan saling kait mengait antara berbagai faktor. Dengan demikian, sosiologi ekonomi selalu memusatkan perhatian pada:

1. Analisis sosiologi terhadap proses ekonomi, misalnya proses pembentukan, harga antara pelaku ekonomi, proses terbentuknya kepercayaan dalam suatu tindakan ekonomi, atau proses terjadinya peselisihan dalam tindakan ekonomi.
2. Analisis hubungan dan interaksi antara ekonomi dan instusi lain dari masyarakat, seperti hubungan antara ekonmi dan agama, pendidikan, stratifikasi sosial, demokrasi, atau politik.
3. Studi tentang perubahan instusi dan parameter budaya yang menjadi konteks bagi landasan ekonomi masyarakat, contohnya semangat kewirusahaan dikalangan santri, capital budaya (*cultural capital*) pada masyarakat nelayan atau etos kerja dikalangan pekerja tambang.

E. Penelitian Yang Relevan

1. Hasil penelitian yang dilaksanakan Sigit Suwardinto pada tahun 2015 mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman bahwa peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa sidoagung yaitu pembangunan fisik

dan pembangunan non fisik. Peranan kepala desa Sidoagung dilihat dari berbagai indikator yaitu Peranan kepala desa dalam pembinaan masyarakat dan Peranan kepala desa dalam mengkoordinasi pembangunan secara partisipatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa Sidoagung ada 2 yaitu factor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi keturunan, kewibawaan, dan kekuasaan. Faktor penghambat meliputi kondisi penduduk, partisipasi penduduk, dan peralatan atau fasilitas.

2. Hasil penelitian yang dilaksanakan Rahmi pada tahun 2018 mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Industry Berbasis Ekonomi Kreatif di Kabupaten Bantaeng bahwa Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif sektor kuliner ada 3 yaitu Tatanan regulasi, pengarahannya strategi, dan Pelatihan. Pemberdayaan melalui upaya yang ditempuh oleh pemerintah itu sudah terlaksana dengan baik, dan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Faktor pendorong pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif sektor kuliner adalah Dukungan Multipihak baik dari Pemerintah (PMD, Koperasi, RKB), Semangat dan respon positif dari masyarakat yang terbukti dengan keikutsertaan dan kehadiran masyarakat, proses pembuatan produk yang tergolong mudah sehingga mudah diterima oleh masyarakat. selain itu kerjasama dalam pemasaran juga menjadi pendorong proses pelaksanaan produksi yang membuat masyarakat tertarik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah kualitatif, yang berbentuk pengamatan untuk memahami tentang fenomena yang terjadi pada subjek yaitu berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang dapat diamati atau diteliti. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode penelitian kualitatif biasanya adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.³⁰

Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan uraian tentang ucapan, tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat maupun organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan menyeluruh dan juga untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan studi. Tujuan utama metode kualitatif adalah untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna, yaitu data yang sebenarnya dan data yang pasti.³¹

Pendekatan ini adalah deskriptif, pendekatan yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti kata-kata (naskah wawancara), gambar (foto dan video), dokumen pribadi, catatan lapangan dan dokumen resmi lainnya, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Tujuan pendekatan deskriptif adalah untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau

³⁰ Lexy. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), hlm, 4-6.

³¹ Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm.20.

kenyataan sosial. Dengan pendekatan deskriptif peneliti akan mendapat data berupa kata-kata, gambar dan lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara. Peneliti tertarik memilih Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara karena peneliti merasa belum terlaksananya pembedayaan sebagai salah satu program kerja pemerintah desa.

C. Sumber Data

Adapun aktifitas yang dilakukan adalah membuat basis data kasus dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, baik data kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penelitian ini untuk sumber dan jenis data yang diperlukan, yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer adalah bersumber dari kepala desa, sekretaris, kaur kesejahteraan, kaur keuangan, kadus, kepala bidang pemberdayaan, pemuka agama (penasehat kepala desa) sebagai nara sumber utama dalam penelitian, penulis mendapatkan data dengan cara wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen, peneliti menulis dan merekam suara supaya mendapatkan data dengan sebenarnya.

2. Data sekunder

Berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini akan digunakan semaksimal mungkin demi mendorong keberhasilan penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, majalah, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi lembaga-lembaga yang terkait dengan

penelitian ini. Pada fungsi yang optimal dapat memberikan pemahaman teoritik dan metodologi yang melandasi dalam melakukan penelitian yang benar.³²

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari responden atau *key informan* yang diteliti. Hubungan pewawancara dengan terwawancara seperti suasana biasa, wajar, dan berjalan seperti kehidupan sehari-hari.

2. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati pengelolaan objek wisata dan ekonomi masyarakat dengan adanya dibuat objek wisata dan mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsungnya, dan biasanya peneliti dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek peristiwa yang sedang diteliti nya.

3. Dokumentasi

Dokumen didapatkan dari pengamatan dilapangan baik berupa catatan lapangan, foto, video.

E. Teknik Analisa Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

³² Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian politik* (Jakarta : Kencana, 2007), hlm.35

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya bila diperlukan.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Menyajikan data yaitu penyusunan sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan Verifikasi.³³

F. Keabsahan Data

1. Kroscek adalah pengecekan kembali dari data-data dan informasi yang didapatkan sehingga penelitian menghasilkan data dan informasi yang tepat.

2. Pengamat berkepanjangan adalah salah satu cara mendapatkan keabsahan data dimana peneliti terus melakukan pengamatan terhadap penelitian yang dilakukan supaya tidak terjadi kekeliruan dalam data.

3. Triangulasi

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.

- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.

- c. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

³³ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Realitions dan Komunikasi* (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm. 221-222

- d. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi dan pemerintah.³⁴

³⁴ Lexi J. Moleong *Metode Penelitian Kualitatif* hlm. 331

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara

1. Riwayat Singkat Desa Sukarimbun

Desa Sukarimbun berdiri sejak tahun 2006, Desa Sukarimbun salah satu desa pemekaran yang berasal dari desa Aunan Sepakat yang di pecah menjadi tiga desa yaitu: Lawe Aunan, Sukarimbun, dan Desa Bintang Bener. Pemerintah daerah butuh tiga tahun untuk menetapkan pemekaran desa, hingga pada bulan April tahun 2006 pemerintah daerah meresmikan ketiga desa tersebut salah satunya desa Sukarimbun. Desa sukarimbun memiliki tiga dusun yaitu: Dusun I Atu Kapur, Dusun II Sena Rebung, Dusun III Timang Rasa. Berikut adalah silsilah kepemimpinan desa Sukarimbun:

- 1) Saparudin Th. 2006-2011
- 2) Saparudin Th. 2011-2016
- 3) Asbi Nasri Th. 2016- Sampai sekarang

2. Kondisi Geografis

Jumlah penduduk Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara dapat diketahui melalui table di bawah ini:

Tabel 1.1

Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara

No	Jenis Kelamin	Jumlah

1	Laki-laki	222 jiwa
2	Perempuan	184 jiwa
Jumlah		406 jiwa

Menganalisa data tersebut ternyata jumlah penduduk desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara berjumlah 406 jiwa, dengan rincian 120 KK (kepala keluarga) dengan perinciannya penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 222 jiwa dan berjenis kelamin perempuan berjumlah 184 jiwa jumlah tersebut dilihat dari persentasenya lebih banyak laki-laki dari pada perempuan.

3. Letak Geografis Desa

Letak desa Sukarimbun berada disebelah barat ibu kota Kecamatan Ketambe jarak dari desa Sukarimbun ke Ibu Kota Kecamatan sekitar 5 KM dan ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 29 KM, batas-batasnya adalah:

Sebelah Utara berbatas dengan Desa Bintang Bener

Sebelah Timur berbatas dengan Desa Lawe Anan

Sebelah Selatan berbatas dengan perkebunan dan gunung Leuser

Sebelah Barat berbatas dengan Desa Gunung Baru

4. Kondisi Perekonomian

Jumlah penduduk Desa Sukarimbun sebanyak 406 jiwa dengan penduduk usia produktif 230 jiwa, sedangkan penduduk yang di kategorikan miskin terdapat 54 KK. Rata-rata mata pencaharian penduduk adalah petani sedangkan hasil produksi ekonomis desa yang menonjol adalah coklat dan jagung

Tabel 1.2

**Tabel Mata Pencaharian Penduduk Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe
Kabupaten Aceh Tenggara**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	PNS	3 Orang
2	TNI dan Polisi	2 Orang
3	Pensiunan	-
4	Petani	197 Orang
5	Pedagang	10 Orang
6	Buruh Bangunan	2 Orang
7	Karyawan BUMN	-
8	Peternak Sapi dan Kambing	3 Orang
9	Sopir	3 Orang
10	Belum Bekerja	98 Orang
11	Tidak Bekerja	5 Orang
12	Lain-lain	83 Orang

5. Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat desa Sukarimbun kental dengan tradisi peninggalan para leluhur baik dalam acara kelahiran anak, khitanan, maupaun perkawinan dengan kegiatan kenduri, kesenian tradisional yang digemari masyarakat antar lain adalah Saman, Bines, Didong, Dabus.

Dari segi pendidikan masyarakat desa Sukarimbun dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 1.3

Table Tingkat Pendidikan Masyarakat

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Sekolah	56 Orang
2	Belum Tamat SD	40 Orang
3	Tidak Tamat SD	35 Orang
4	Tamat SD	145 Orang
5	Tamat SLTP	74 Orang
6	Tamat SLTA	52 Orang
7	Tamat Akedemik/Perguruan Tinggi	4 Orang

6. Kondisi Sarana dan Prasarana

Desa Sukarimbun memiliki sarana dan prasarana untuk masyarakat yang terdapat disetiap dusun, yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum

1) Sarana dan prasarana pemerintah

Sarana dan prasarana Pemerintah Desa Sukarimbun mempunyai kantor balai desa yang terletak didusun II Sena Rebung. Yang meliputi sarana prasarana dibidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan dan sarana umum. Sedangkan didesa Sukarimbun mempunyai 3 dusun dan dikepalai 3 kepala dusun. Sarana prasarana tersebut berjalan sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2) Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan prasarana pendidikan di desa Sukarimbun mempunyai sekolah yaitu SD.

3) Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di desa Sukarimbun yaitu puskesmas 1 unit dan posyandu 1 pos.

4) Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Sukarimbun memiliki 1 Masjid, 1 Musholla.

5) Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di desa Sukarimbun meliputi perdagangan dan kesehatan, sarana dan prasarana di bidang perdagangan di desa Sukarimbun terdapat jual beli cokelat dan jagung dan berada di setiap dusun bidang kesehatan memiliki beberapa MCK umum yang terdapat di dua dusun yaitu dusun I dan dusun II yang kondisinya cukup memprihatinkan. Jalan desa Sukarimbun meliputi jalan desa jalan dusun. Serta jalan kabupaten ruas jalan di desa sudah beraspal dan babat beton.

B. Upaya Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat

1. Perencanaan

Perencanaan pemerintah desa memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa guna mensejahterkan masyarakatnya dan bisa berdaya mandiri dengan usaha yang dimilikinya.

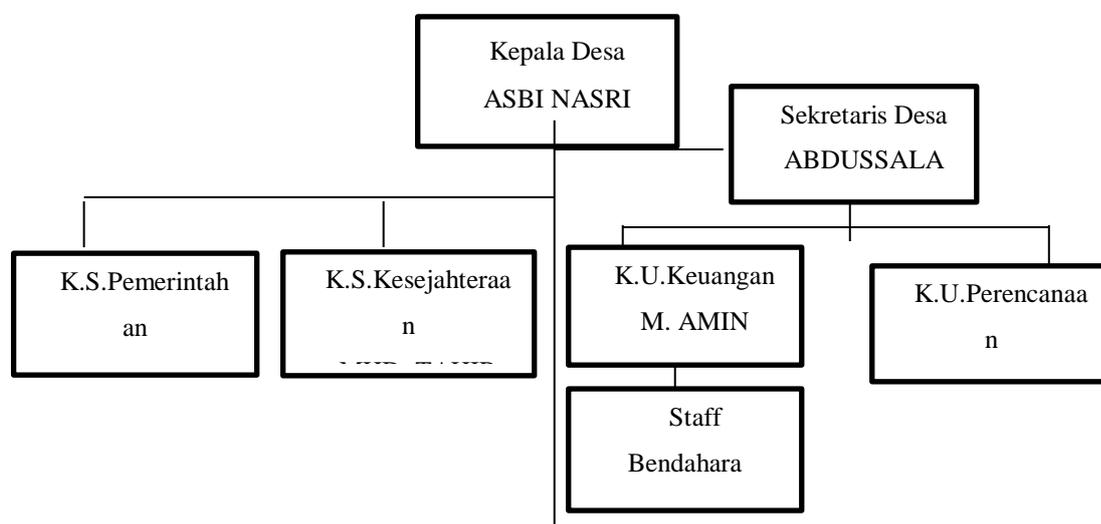
Perencanaan dalam pelaksanaan program kerja pemerintah desa pada kurun waktu pertengahan bulan Maret 2018 sampai satubulan setengah lamanya hingga pada bulan Mei 2018 ditetapkanlah siapa-siapa yang berhak mendapatkan pembedayaan dari pemerintah, dalam melakukan perencanaan perancangan, melakukan diskusi antar prangkat desa pemberdayaan apa yang mampu mensejahterakan masyarakat desa.

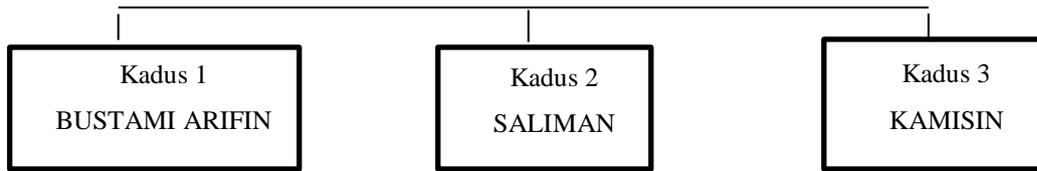
Diskusi yang dilakukan oleh perangkat desa untuk menentukan pemberdayaan pertanian di bidang Serai Wangi menjadi pemilihan tanaman yang di berikan kepada masyarakat, meski banyak tanaman lain yang diusulkan dalam rapat diskusi program kerja, kepala desa setuju jika serai wangi lah yang diberikan kepada masyarakat

Program yang diimplementasikan terhadap petani di Desa Sukarimbun adalah “Penanaman Modal dan Pelatihan Pertanian”. Modal merupakan uang yang diberikan oleh pemerintah untuk petani dengan harapan hasil panen yang banyak dan berkembang agar dapat memperbanyak masyarakat untuk menjadi petani serai wangi, dan dengan harapan hasil panen petani yang bagus dan melimpah sehingga tarap hidup dapat terbedayakan.

Modal yang diberikan pada petani serai wangi dimulai pada tahun 2018. Tepatnya pada bulan mei masa pembersihan lahan yang digunakan masyarakat, proses kegiatan pemberdayaan ekonomi ini di lakukan melalui pelatihan dan pembelajaran lapangan mempelajari cara penanaman, pengurusan, panen, dan pengukusan agar hasilnya memuaskan.

2. pengorganisasian





Kepala desa adalah jabatan tertinggi dalam sebuah organisasi desa segala yang berkaitan dengan desa kepala desa yang berperan penting dalam memberikan kebijakan dan norma-norma di desa yang dia pimpin, perangkat desa yang membantu dan segala keperluan kepala desa dengan cara bertindak terlebih dahulu tergantung bidang masing-masing.

Susunan pengorganisasian menentukan hasil dari sebuah organisasi yang didirikan baik dalam perencanaan kerja maupun dalam pelaksanaannya. Program kerja pemberdayaan masyarakat yang telah terlaksana adalah salah satu bentuk keberhasilan pengorganisasian, kepala desa selaku jabatan tertinggi dan penentu kebijakan mengambil langkah yang tepat dalam memberdayakan masyarakatnya.

3. Pergerakan

Pergerakan yang dilakukan di Desa ini adalah penanaman serai wangi dari bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan perekonomian rakyatnya. Pemberdayaan dilakukan supaya masyarakat mampu mandiri berdiri dan berdaya, tanaman Serai Wangi termasuk tumbuhan yang hidup panjang dan jarak panen yang cukup dekat sehingga pemerintah memberdayakan masyarakatnya dengan menanam Serai Wangi

Pergerakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dengan cara:

a. Pelatihan

Penyuluhan pertanian memberikan pelatihan kepada petani Serai Wangi mulai dari cara menanam, merawat dan memanen Serai Wangi. pelatihan dilaksanakan berdasarkan antara penyuluhan dan petani Serai Wangi. menurut bapak Asbi Nasri, pelatihan yang di lakukan dapat memberikan wawasan kepada para petani Serai

Wangi hanya di lakukan jika instansi atau lembaga pemerintah yang memfasilitasi pelatihan tersebut.

Pelatihan dilakukan setiap dua minggu sekali guna memperdalam pengetahuan dan menjawab dari permasalahan yang di rasakan oleh petani dalam penanaman, perawatan, dan memanen Serai wangi, pemerintah berupaya untuk masyarakat tidak lagi mendapatkan kesulitan dikala dilapangan dalam pengurusan serai wangi baik itu penanaman pengurusan dan pengentasan hama pada tananaman serai wangi.

b. Penyuluhan

Dalam proses meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat petani hal yang terpenting adalah memberikan penyuluhan kepada para petani Serai Wangi yang telah dilaksanakan pada jadwal yang sudah ditentukan oleh penyuluhan dan para petani Serai Wangi. Dengan adanya penyuluhan, maka petani dapat mengetahui dan membawa wawasan tentang pengolahan pertanian Serai Wangi dengan cara pengolahan yang efektif dan tepat guna dapat meningkatkan hasil panen sehingga prekonomian masyarakat dapat meningkat. Hal ini sebagai mana dalam bab II bahwa ekonomi masyarakat yang dimaksudkan untuk suatu usaha dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaanya yang berhubungan dengan pengalokasian sumber daya masyarakat.

c. Modal

Modal merupakan bantuan dari pemerintah yang di salurkan untuk para petani Serai wangi di desa Sukarimbun, modal yang di berikan pemerintah dari pemberishan lahan, pembibitan pengurusan sampai panen pertama, yang akan harus di kembalikan apabila sudah sampai padan panan ke dua dan seterusnya dan dana akan di gunakan kembali untuk memberdayakan masyarakat yang kurang berdaya.

Dana yang diberikan pemerintah secara bertahap di tinjau dari sejauh mana perkembangan tananaman serai wangi apakah baru pembersihan lahan, masa penanaman, pengurusan, dan panen pertama. Pemerintah desa tidak langsung memberikan semua dana yang telah disepakati guna mengurangi penyalahgunaan dana oleh masyarakat, dana juga tidak akan dikeluarkan jika petani belum menyelesaikan satu langkah pun untuk pelaksanaan penanaman serai wangi. dan jika masyarakat yang sudah menerima dana pertama namun tidak melanjutkan penanaman serai wangi maka masyarakat tersebut akan dikeluarkan dari pemberdayaan pemerintah sekarang dan kedepannya.

Adapun besaran dana yang di berikan pemerintah desa sebagai berikut:

Besaran dana yang diberikan pemerintah desa kepada petani serai wangi yang di telah di berdayakan senilai Rp 2.000.000., /kepala keluarga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.4

Tabel dana desa

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah
1	Pembersihan Lahan	Rp. 375.000
2	Bibit Serai Wangi	Rp. 1.000.000
3	Pupuk	Rp. 250.000
4	Panen Pertama	Rp. 375.000
Jumlah		Rp. 2.000.000

4. Pengontrolan

Pengontrolan di lakukan oleh aparaturnya desa yang bertugas memantau ke lokasi penanaman Serai Wangi yang di berdayakan pemerintah desa, pengontrolan dilakukan setiap sepekan sekali dan melaporkan kepada pemerintah untuk di jadikan pembahasan dikala penyuluhan dan rapat perubahan yang sudah tampak pada tanaman Serai Wangi sampai panen pertama dari Serai Wangi.

Pengontrolan akan terus dilakukan guna mengetahui perubahan, media yang di gunakan dalam pengontrolan kertas, pulpen dan kamera. Kertas dan pulpen untuk mencatat sejauh mana perubahan pada tanaman mengukur persen keberhasilan dan kamera sebagai bukti yang bisa di tampilkan pada kala diskusi pembahasan dan penyuluhan petani serai wangi, dengan media yang ada prangkat desa berupaya mengatasi permasalahan dilapangan dan dapat diketahui segala yang terjadi dilapangan dengan adanya laporan dari petugas yang mengontrol lapangan

5. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan setiap tahun dan dilakukan secara berkala sesuai peraturan permendagri nomor 81 tahun 2015 tentang evaluasi perkembangan desa dan kelurahan pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemantauan dilakukan secara berkala ditingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota serta desa dan kelurahan. Acara evaluasi ini dilaksanakan dengan meriah dengan membuat perlombaan untuk mencapai desa yang tangguh dan mandiri menuju evaluasi tingkat pusat.

Evaluasi ini guna untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang diperoleh dari pemberdayaan pemerintah desa. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis telah menelusuri dari sebelum masyarakat diberdayakan dan sampai mereka diberdayakan dan mengamati dari segi ekonomi masyarakat betul-betul butuh akan pergerakan dari pemerintah desa untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, selain dari segi

ekonomi masyarakat juga kurang pengetahuan tentang pertanian yang bisa menghasilkan panen memuaskan.

Peneliti telah mengamati dan mempertanyakan langsung bagaimana keadaan ekonomi masyarakat sebelum diberdayakan dan sesudah diberdayakan oleh pemerintah, tabel sebagai berikut:

Tabel 1.5

Penghasilan sebelum dan sesudah

No	Kepala keluarga	pekerjaa n	Penghasilan sebelum	Penghasilan sesudah
1	Pak Ayu	Petani	Rp: 4.212.000 /4 bln	Rp:16.212.000 /4 bln
2	Pak Manan	Kenek	Rp: 4.175.000 /4 bln	Rp:16.175.000 /4 bln
3	Pak Salam	petani	Rp: 5.655.000 /4bln	Rp:13.500.000 /4 bln

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis masyarakat yang berhak mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah dari segi ekonomi tepat pada sasaran dikarekan perekonomian sebelum mereka diberdayakan Pak Ayu petani coklat dan pinang yang hasilnya kian memburuk selain batang coklat yang sudah tua membuat hasil panen tidak memuaskan, pak manan petani dan kenek dari mobil sewa didaerah desa pagi pergi menjadi kenek siang pergi kelahan kebun warga untuk menambah penghasilan, Pak Salam adalah masyarakat yang patut diberdayakan karean sebelum diberdayakan pak Salam hanya petani jagung dan rumahnya masih dikontrak/sewa dari ketiga anaknya baru satu yang bersekolah dan pendapatan belum mencukupi.

Setelah pemberdayaan dilakukan pak manan bisa menyelesaikan rumahnya yang dulu masih ngontrak kini sudah memiliki kereta untuk ke gunung dan peralatan dapur lainnya, pak Ayu yang dulu mencita-citakan anaknya bisa sekolah salah satu ponpes disana kini sudah bisa ke dua anak di sekolahkan di tempat tersebut, dan sudah memiliki warung kecil sebagai penambah penghasilan, pak Salam sudah bisa membayarkan rumahnya yang dulu dikontrkannya dan sudah memiliki alat dapur untuk memudahkan pekerjaan sehari-hari.

Fokus penelitian terhadap pemerintah desa untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui petani serai wangi yang beranggotakan 3 orang, merupakan hasil dari suatu analisa penulis dalam mengetahui pemberdayaan pemerintah desa untuk meningkatkan serta membantu perekonomian masyarakat kecil.

Tingkat pendidikan mayoritas kepala keluarga hanya Sekolah Dasar (SD) dan ada juga yang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Rataan lahan penanaman serai wangi 1 ha, dengan tingkat pendapatan 40 kg sampai 50 kg sekali panen dalam kurun waktu 4 bulan sekali. Sumber utama pendapatan diperoleh dari usaha serai wangi, coklat dan jagung.

Pemerintah desa mengambil langkah pemberdayaan ini bukan tidak mengadakan diskusi antar perangkat desa butuh kurang lebih satu bulan lebih untuk mendiskusikan pemberdayaan apa yang harus dilakukan menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan pemberdayaan dari pemerintah, banyak masyarakat juga mengharapkan pemberdayaan dari pemerintah namun pemerintah desa tidak bisa menambah orang yang sudah ditentukan.

C. Kendala yang dihadapi pemberdayaan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe

Menurut wawancara terbuka kepada bapak kepala desa sukarimbun pak Asbi nasi hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat yaitu 1 Karena daerah kita termasuk dikelilingi oleh perbatasan hutan TNGL maka untuk perluasan lahan, ijin untuk perluasan lahan penanaman Serai Wangi didaerah kita tidak ada lagi.

Masalah biaya yang kita berikan masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan komoditi tanaman Serai Wangi ini karena kemampuan kita sekedar modal seadanya

Berdasarkan SK Kementrian Kehutanan No 276/kpts-VI/1997, luas TNGL sekitar 1.094.692 hektare, yang wilayahnya meliputi Propinsi Aceh dan Sumatra Utara. Namun pada 2014, SK No 856 dan SK No 579 menyatakan luas TNGL adalah 838.872 hektare, Menegeri Konsevasi Leuser (FKL) Rudi Putra mengatakan, pada 2016, FKL telah memusnahkan sekitar 100 hektare perkebunan ilegal didalam TNGL. Umumnya, yang dimusnahkan adalah perkebunan kelapa sawit “ tahun ini, kebun TNGL yang akan dimusnahkan sekitar 1.000 hektare ungkapnya.

Peraturan pemerintah terhadap larangan perluasan lahan perkebunan salah satu yang menghambat petani yang di berdayakan tidak memiliki lahan perkebunan karena lahan yang di miliki sudah di tanami pokok coklat, jagung dan lainnya, sehingga masyarakat lain yang juga ingin di berdayakan oleh pemerintah desa sudah tidak memiliki lahan penanaman lahan maka pemerintah tidak akan memberikan modal kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk penanaman Serai Wangi

Dana yang dimiliki pemerintah desa masih tergolong sedikit, pemerintah hanya bisa memberdayakan 10 sampai 15 keluarga dalam satu program kerja, banyak masyarakat yang mengharapkan di berdayakan oleh pemerintah desa namun dana yang dimiliki belum cukup banyak untuk memberdayakan masyarakat, pemerintah daerah juga belum ada memberikan dorongan dan dana untuk pemberdayaan pemerintah desa

Harapan pak kepala desa dari wawancara terbuka kepada pak Asbi Nasri “harapan kami sebagai, harapan saya sebagai kepala desa untuk desa kami di desa sukarimbun kami membutuhkan dukungan atau dorongan dari pemerintah agar pengembangan Serai Wangi ini berlanjut terus dan modal dapat bertambah lagi agar perkembangan Serai Wangi di desa kami lebih maju dan menguntungkan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dikemukakan diatas, skripsi ini membahas tentang Pemberdayaan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupate Aceh Tenggara, maka permasalahan ini yang ada dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara yaitu: Program yang diimplementasikan terhadap petani di Desa Sukarimbun adalah “ Penanaman Modal dan Pelatihan Pertanian”. Modal merupakan uang yang diberikan oleh pemerintah untuk petani dengan harapan hasil panen yang banyak dan berkembang agar dapat memperbanyak masyarakat untuk menjadi petani serai wangi, dan dengan harapan hasil panen petani yang bagus dan melimpah sehingga tarap hidup dapat terbedayakan. Modal yang diberikan pada petani serai wangi dimulai pada tahun 2018. Proses kegiatan pemberdayaan ekonomi ini di lakukan melalui pelatihan dan pembelajaran lapangan.

Dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat para petani Serai Wangi di desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, tidak hanya memberikan pembeinaan saja tetapi juga mendampingi masyarakat serta memfasilitasi masyarakat petani dengan memberikan modal, dengan adanya modal yang di berikan pemerintah kepada para petani Serai Wangi, dengan adanya modal yang di berikan pemerintah kepada para Petani Serai Wangi, petani terbantu untuk bisa mengelola tanah yang kosong untuk di jadikan sumber penghasilan seperti Serai Wangi yang di berdayakan oleh pemerintah.

2. Peraturan pemerintah terhadap larangan perluasan lahan perkebunan salah satu yang menghambat petani yang di berdayakan tidak memiliki lahan perkebunan karena lahan yang di miliki sudah di tanami pokok coklat, jagung dan lainnya, sehingga masyarakat lain yang juga ingin di berdayakan oleh pemerintah desa sudah tidak memiliki lahan penanaman lahan maka pemerintah tidak akan memberikan modal kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk penanaman Serai Wangi
Dana yang dimiliki pemerintah desa masih tergolong sedikit, pemerintah hanya bisa memberdayakan 10 sampai 15 keluarga dalam satu program kerja, banyak masyarakat yang mengharapkan di berdayakan oleh pemerintah desa namun dana yang dimiliki belum cukup banyak untuk memberdayakan masyarakat, pemerintah daerah juga belum ada memberikan dorongan dan dana untuk pemberdayaan pemerintah desa

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang dapat di sampaikan adalah:

1. Dari pemberdayaan pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara, dan diharap bagi pemerintah desa agar selalu memantau pekerjaan masyarakatnya terutama dapat mengembangkan potensi alam yang ada di desa Sukarimbun.
2. Bagi pemerintah desa diharapkan lebih mengembangkan program penanaman serai wangi ini agar lebih banyak lagi masyarakat yang ikut serta guna untuk membantu prekonomian masyarakat.

-
-
3. Petani serai wangi yang mendapat modal dari pemerintah desa mestinya dapat menjadikan suatu momen kebangkitan hidupnya, agar dapat berkembang dan dapat menyalurkan ilmunya kepada masyarakat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Isbandi Rukmianto, 2002, *Intervensi Komunitas, Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Agus Ahmad Safei, Nanih Machendrawati, 2003, *pengembangan Masyarakat Islam Dari Ideologi, Strategi Sampai Tradisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya
- Ambar Teguh Sulistiyani, 2004, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gava Media
- Burhan Bungin, 2007, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenada Media Group
- Damsar, 2011, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta : Prenada Media Group
- Deliarnov, 2010, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Edi Suharto, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama
- Ginanjar Kartasasmita, 1996, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat*, Jakarta: Bappenas
- Gunawan Sumodiningrat, 1999, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Haw Widjaja, HAW, 2003, *Pemerintahan Desa/ Marg*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Isbandi Rukminto Adi, 2002 *Pemikiran-Pemikiran Dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: LP FEUL
- Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari, 2008, *Jami' Al-Bayan fii Ta'wil Al-Quran*, Jakarta: Pustaka Azza
- Jafar Hafisah, 2006, *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Iris Pres
- Lexy J. Moleong, 2017, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Lisa Harrison, 2007, *Metodologi Penelitian politik* Jakarta : Kencana

Pranaka,A.M.W, Priyono Onny,S,1996 *Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasi*,Jakarta: CSIS

Priyono Tjiptoherijanto, 1997, *Prospek Prekonomian Indonesia Dalam Rangka Globalisasi*, Jakarta: PT Rineka Cipta

Rahardjo Adisasmita,2011, *Manajemen Pemerintahan Desa*, Yogyakarta: Graha Ilmu

Rosady Ruslan,2008, *Metode penelitian Publik Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Suwandi,2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebiato, 2019, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor, 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor, 72 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Desa

Ulber silalahi,2009, *Metode Penelitian Sosial* Bandung: PT Refika Aditama

Usman Sunyoto,2004, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Wrihatnolo dan Dwidjowijoto,2007, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: PT. Elek Media Komputindo

Zubaedi, 2013, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, Jakarta: Prenadamedia Group

LAMPIRAN



Foto Bersama Kepala Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara



Foto Bersama Petani Seraiwangi Desa Sukarimbun Kecamatan Ketambe Kabupaten Aceh Tenggara



Foto Petani Sedang Memanen Serai Wangi



Foto Serai Wangi



Foto Tempat Pengolahan Serai Wangi



Foto Pak Salam



Kebun Pak Salam



Tempat Pengukusan Kebun Serai